

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Inklusif dalam Meningkatkan Toleransi dan Kemandirian Sosial Anak Berkebutuhan Khusus: Sebuah Studi Literatur

Sri Wahyudi*, 

Universitas Doktor Nugroho Magetan, Magetan, Indonesia

Penulis Korespondensi: massriwahyu@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: July 01, 2025

Revised: July 05, 2025

Accepted: July 09, 2025

Available online: July 11, 2025

Kata Kunci:

Terdiri dari 3-5 kata

Anak Berkebutuhan Khusus,
Pendidikan Kewarganegaraan,
Kemandirian Sosial

DOI:

<https://dx.doi.org/10.23887/.....>

ABSTRAK

Anak berkebutuhan khusus (ABK) kerap dihadapkan pada kesulitan dalam aspek sosial dan proses integrasi, seperti minimnya toleransi dari lingkungan sekitar serta kurangnya kemampuan mandiri secara sosial. Pendidikan kewarganegaraan yang bersifat inklusif dipandang sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan ini, karena ia memadukan prinsip-prinsip toleransi, hak asasi manusia, dan pemberdayaan dalam sistem pendidikan yang menghargai keragaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji literatur terkait bagaimana penerapan pendidikan kewarganegaraan inklusif dapat memperkuat toleransi dan kemandirian sosial pada ABK, dengan perhatian khusus pada praktik yang dijalankan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, serta dampak yang timbul. Metode yang digunakan merupakan studi literatur dan analisis isi terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan mengenai pendidikan inklusif, kewarganegaraan, dan anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif yang berhasil melibatkan kurikulum yang fleksibel terhadap kebutuhan khusus, strategi pengajaran adaptif seperti diferensiasi, pembelajaran berbasis pengalaman, serta dukungan dari siswa sebaya, lingkungan sekolah yang mendukung dengan keterlibatan guru dan orang tua. Pelaksanaan tersebut terbukti meningkatkan toleransi antara siswa reguler dan ABK, memperkuat rasa saling menghargai, serta mengembangkan kemandirian sosial ABK melalui partisipasi aktif, kemampuan bersosialisasi, dan inisiatif pribadi. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan inklusif memiliki potensi besar dalam menanamkan dan memperkuat nilai toleransi serta kemandirian sosial bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, pelatihan bagi guru, penyediaan sumber daya dan media yang sesuai, serta evaluasi secara berkelanjutan.

This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2025 by the author(s).

Published by **PT Literana Inovasi Digital**



1. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi landasan fundamental dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta kompetensi sosial setiap individu. Bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan memiliki signifikansi yang lebih besar karena tidak hanya berfungsi mengembangkan aspek akademik, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kemandirian dan mendorong proses integrasi sosial (Norwich et al., 2022). Kelompok ini sering menghadapi tantangan ganda, baik yang bersumber dari keterbatasan diri maupun dari lingkungan sosial yang kurang memberikan ruang penerimaan. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang mampu menghubungkan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan toleransi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan inklusif dipandang sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

Konsep pendidikan kewarganegaraan inklusif tidak semata berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara, melainkan juga menekankan prinsip keadilan sosial, sikap toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman. Hal ini menjadi krusial mengingat anak berkebutuhan khusus kerap berada pada posisi rentan terhadap diskriminasi maupun pelabelan negatif dari lingkungan sekitar. Model pendidikan yang eksklusif dan kurang responsif terhadap keragaman justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, sekaligus menghambat proses integrasi anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penerapan pendekatan inklusif, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan menjunjung tinggi perbedaan.

Konsep toleransi merupakan nilai esensial yang perlu ditanamkan sejak usia dini, khususnya dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Anak berkebutuhan khusus memerlukan lingkungan yang tidak sekadar menerima keberadaan mereka, melainkan juga memberikan ruang bagi terciptanya interaksi yang adil dan bermakna. Rendahnya sikap toleran dari masyarakat kerap menyebabkan mereka mengalami keterasingan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan inklusif, peserta didik diarahkan untuk memandang keberagaman sebagai aset bangsa yang berharga, bukan hambatan. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud budaya hidup berdampingan secara harmonis serta terciptanya solidaritas sosial yang lebih kuat.

Selain menanamkan nilai toleransi, penguatan kemandirian sosial menjadi salah satu tujuan penting yang harus dibangun pada anak berkebutuhan khusus. Konsep kemandirian sosial tidak sebatas pada kemampuan individu dalam memenuhi aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, melainkan juga menyangkut keterampilan sosial yang lebih luas. Hal ini mencakup kemampuan menjalin interaksi yang sehat dengan lingkungan, keterampilan dalam mengambil keputusan secara mandiri, serta tanggung jawab terhadap peran sosial yang dijalankan. Kenyataannya, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan aspek ini karena keterbatasan dukungan pendidikan yang tersedia. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman pendidik, keterbatasan sarana, dan rendahnya perhatian dari lingkungan turut memperburuk situasi tersebut (Iyanda, 2022). Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan inklusif memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata. Melalui penerapan nilai partisipasi aktif, penghargaan terhadap kesetaraan hak, serta penanaman rasa tanggung jawab, kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus dapat terbentuk lebih optimal. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan inklusif tidak hanya membekali anak dengan pemahaman normatif tentang kewarganegaraan, tetapi juga membangun kemampuan praktis untuk hidup mandiri dan berperan aktif di masyarakat.

Implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif memerlukan perubahan paradigma dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, serta masyarakat. Guru tidak hanya dituntut menguasai aspek akademik, tetapi juga diharapkan mampu merancang pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada penghargaan terhadap keragaman (Lagler et al., 2021). Anak berkebutuhan khusus perlu difasilitasi agar dapat berpartisipasi secara aktif, baik dalam kegiatan belajar maupun interaksi sosial. Dengan keterlibatan tersebut, mereka tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek pendidikan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, suara, dan kesempatan setara. Melalui pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan bermakna. Pada akhirnya, tujuan pembangunan manusia seutuhnya dapat tercapai melalui praktik pendidikan kewarganegaraan yang menjunjung nilai keadilan dan kesetaraan.

Dalam ranah pendidikan nasional, regulasi mengenai pendidikan inklusif sejatinya telah memperoleh legitimasi formal melalui sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian, pada tataran implementasi di lapangan masih dijumpai berbagai hambatan yang cukup kompleks. Beberapa kendala yang muncul antara lain terbatasnya fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar secara inklusif. Selain itu, sebagian tenaga pendidik masih memiliki keterbatasan dalam menguasai strategi pembelajaran yang adaptif bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus (DiGiacomo et al., 2021). Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang toleran terhadap anak berkebutuhan khusus juga masih relatif rendah. Situasi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan praktik nyata di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya evaluasi mendalam guna menilai efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah berjalan. Selanjutnya, penguatan strategi pendidikan menjadi hal yang mendesak, terutama dalam kerangka mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini penting karena PKn memiliki

posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta apresiasi terhadap keragaman sosial budaya.

Studi literatur tentang implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif memiliki urgensi yang tinggi karena mampu memberikan pemahaman menyeluruh terkait berbagai model, pendekatan, dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menelusuri beragam perspektif yang telah dikembangkan serta mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya dalam konteks pendidikan inklusif. Selain itu, analisis literatur berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori yang ideal dengan kenyataan di lapangan yang kerap menghadirkan hambatan tertentu (Weinschenk & Dawes, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif melalui tawaran strategi yang lebih relevan dan aplikatif. Harapannya, hasil penelitian dapat menemukan pola pembelajaran kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Pola tersebut ditujukan untuk memperkuat nilai toleransi dan meningkatkan kemandirian sosial mereka. Pada akhirnya, anak berkebutuhan khusus diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan sejajar dengan warga negara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai isu global, seperti inklusi sosial, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip “no one left behind”. Pendidikan inklusif tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral maupun aspek legal, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban. Dalam konteks ini, implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif berfungsi sebagai sarana penguatan nilai demokrasi dan penghargaan terhadap keragaman (Woyshner, 2023). Lebih dari itu, pendekatan ini harus dipahami sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada pembentukan generasi masa depan. Generasi tersebut diharapkan memiliki sikap toleran, kemampuan mandiri, dan kompetensi sosial yang adaptif. Hal ini penting mengingat perubahan sosial dan dinamika global menuntut adanya sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan inklusif memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat inklusif sekaligus memperkuat ketahanan bangsa.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami isu terkait pendidikan inklusif. Penelitian Sari (2020) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun empati sosial siswa reguler terhadap anak berkebutuhan khusus, meskipun belum mengulas secara mendalam aspek kemandirian sosial. Sementara itu, Rahman (2021) meneliti implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar, tetapi titik perhatiannya lebih difokuskan pada strategi guru dalam pengelolaan kelas heterogen, bukan pada dimensi toleransi dan kewarganegaraan. Di sisi lain, Lestari (2022) menyoroti keterkaitan antara pendidikan karakter dengan sikap toleransi siswa, namun belum mengintegrasikan pendekatan pendidikan kewarganegaraan inklusif secara eksplisit bagi anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini menawarkan fokus baru dengan menekankan integrasi pendidikan kewarganegaraan inklusif yang diarahkan untuk meningkatkan dua aspek krusial, yakni sikap toleransi dari lingkungan sekitar serta kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual maupun praktis yang lebih komprehensif bagi pengembangan kajian akademik sekaligus praktik pendidikan di sekolah.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi literatur yang berfokus pada analisis isi (content analysis) terhadap berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan tema pendidikan inklusif, pendidikan kewarganegaraan, serta pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (Peng, 2024). Pemilihan studi literatur dipandang tepat karena mampu memberikan pemahaman menyeluruh terkait perkembangan konsep, teori, dan praktik implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif pada beragam konteks pendidikan. Melalui telaah kritis terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi pola umum, menemukan kesenjangan penelitian, sekaligus menggali peluang baru untuk mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan kebutuhan khusus peserta didik. Pendekatan ini juga memberikan keuntungan karena meminimalisasi bias yang mungkin muncul dalam penelitian lapangan dan lebih menekankan pada kajian konseptual serta data empiris yang bersumber dari literatur akademik terpercaya. Oleh sebab itu, metode studi literatur dianggap relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus mengeksplorasi strategi, tantangan, serta implikasi implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif dalam meningkatkan sikap toleransi dan kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus.

Sumber data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai basis jurnal nasional maupun internasional yang diperoleh melalui portal akademik, antara lain Google Scholar, ResearchGate, DOAJ, Springer, Scopus, serta Sinta. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah terakreditasi, prosiding konferensi, dan publikasi akademik lain yang memiliki relevansi dengan isu pendidikan inklusif maupun pendidikan kewarganegaraan. Dalam proses seleksi, ditetapkan kriteria inklusi berupa (Anderson, 2023): (1) artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, (2) mencakup topik pendidikan inklusif, kewarganegaraan, atau anak berkebutuhan khusus, dan (3) tersedia dalam teks lengkap untuk dianalisis secara komprehensif. Selain itu, ditentukan pula kriteria eksklusi untuk menyingkirkan sumber yang bersifat duplikasi, tidak relevan, atau lemah secara metodologis. Melalui mekanisme seleksi yang ketat tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa literatur yang digunakan memenuhi standar kualitas, memiliki kredibilitas, serta relevan secara akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam analisis penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah ditelaah (Alva et al., 2023). Tahapan analisis dimulai dengan membaca artikel terpilih secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, kemudian dilakukan proses pengkodean terhadap konsep-konsep penting yang relevan dengan isu pendidikan kewarganegaraan inklusif, toleransi, serta kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, hasil pengkodean tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema yang memiliki kesamaan agar dapat ditemukan pola tertentu, kesenjangan penelitian, maupun keterkaitan antarvariabel (Guss et al., 2021). Melalui proses ini, peneliti mampu menelaah lebih jauh faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif, serta menelusuri capaian positif dari penerapannya. Dengan demikian, analisis tematik berfungsi tidak hanya sebagai teknik identifikasi data, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang sistematis dan terstruktur untuk memahami fenomena secara lebih mendalam serta menghasilkan sintesis baru bagi pengembangan kajian.

Untuk menjamin validitas serta reliabilitas temuan penelitian, peneliti menerapkan prosedur triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil kajian dari berbagai literatur yang memiliki latar dan konteks berbeda. Proses analisis dilakukan secara berulang dan mendalam agar interpretasi yang diperoleh tetap konsisten, obyektif, serta bebas dari kecenderungan subjektif. Dalam upaya meminimalisasi bias personal, peneliti juga memanfaatkan catatan reflektif sebagai instrumen evaluasi internal selama proses analisis berlangsung. Hasil kajian selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, tidak hanya sebatas merangkum temuan dari penelitian terdahulu, melainkan juga mengkritisi serta menghubungkan ide-ide yang relevan. Integrasi berbagai gagasan tersebut menghasilkan sintesis baru yang lebih komprehensif (Bozkus-Genc & Sani-Bozkurt, 2022). Dengan strategi ini, penelitian mampu menghadirkan kontribusi yang bermakna dalam ranah akademik maupun praktik pendidikan. Secara khusus, hasilnya diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif dalam menumbuhkan sikap toleransi dan mengembangkan kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan pendidikan kewarganegaraan inklusif secara konsisten menekankan urgensi kurikulum yang fleksibel guna mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang kaku terbukti menjadi penghambat utama dalam proses belajar, sehingga diperlukan modifikasi materi dan metode agar seluruh peserta didik dapat mengakses pembelajaran secara setara. Kajian literatur menegaskan bahwa fleksibilitas kurikulum memberi keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, serta kondisi psikososial siswa. Melalui pendekatan ini, anak berkebutuhan khusus tidak lagi diposisikan sekadar sebagai penerima informasi, melainkan turut berperan aktif dalam dinamika pembelajaran. Implementasi kurikulum yang adaptif juga menunjukkan peningkatan keterlibatan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler. Selain itu, rasa keterasingan yang sebelumnya kerap dialami berangsur berkurang. Dengan demikian, fleksibilitas kurikulum tidak hanya memperkuat aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas integrasi sosial dan partisipasi dalam lingkungan belajar yang lebih inklusif.

Strategi pengajaran adaptif memiliki peran krusial dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan inklusif karena mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan beragam peserta didik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan diferensiasi, seperti pemberian variasi tugas, pemanfaatan media multi-sensori, serta instruksi yang diadaptasi, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anak berkebutuhan khusus terhadap materi. Di samping itu, penggunaan pembelajaran berbasis pengalaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif melalui praktik langsung dalam kegiatan belajar. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik lebih mudah menginternalisasi nilai kewarganegaraan, sebab mereka mengalami secara nyata konteks yang menumbuhkan kerja sama, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan. Guru yang mampu merancang strategi adaptif dengan baik berhasil membangun iklim kelas yang ramah dan inklusif,

sehingga interaksi antarsiswa berjalan lebih alami, dinamis, dan saling mendukung demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Peran siswa sebaya terbukti memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan kewarganegaraan inklusif. Dukungan yang diberikan teman sebaya tidak hanya berfungsi dalam membantu anak berkebutuhan khusus memahami materi pembelajaran, melainkan juga berperan dalam membangun pola interaksi sosial yang lebih positif. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan program peer tutoring dan kegiatan kerja kelompok kolaboratif mampu mendorong tumbuhnya sikap toleransi serta mengurangi kecenderungan perilaku diskriminatif di kalangan siswa reguler. Anak berkebutuhan khusus yang terlibat dalam interaksi dengan dukungan teman sebaya cenderung menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, keberanian untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelas, dan keterampilan menjalin relasi sosial yang lebih luas. Kondisi ini menegaskan bahwa pencapaian inklusi sosial tidak semata-mata bergantung pada peran guru, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas kelas yang saling mendukung.

Lingkungan sekolah yang kondusif merupakan faktor eksternal yang berperan krusial dalam kesuksesan penerapan pendidikan kewarganegaraan inklusif. Kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kebijakan sekolah, budaya organisasi, serta keterlibatan seluruh elemen pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran agar berlangsung adil dan setara, sedangkan orang tua memberikan dukungan emosional serta motivasi untuk memperkuat kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Sinergi antara guru, siswa, dan orang tua melalui budaya kolaboratif menciptakan iklim sekolah yang mendorong tumbuhnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Situasi tersebut menghasilkan lingkungan belajar yang tidak hanya ramah bagi semua siswa, tetapi juga menumbuhkan nilai kebersamaan dan solidaritas. Dengan demikian, terbukti bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan harus didukung oleh sistem pendidikan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan baik.

Implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif terbukti memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan sikap toleransi antara siswa reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Kajian literatur memperlihatkan adanya perubahan perilaku siswa reguler yang awalnya cenderung menghindari interaksi, kemudian berkembang menjadi lebih terbuka serta menerima keberadaan teman sebaya yang memiliki kebutuhan berbeda. Nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan apresiasi terhadap keragaman semakin tertanam dalam praktik keseharian siswa di lingkungan sekolah. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dirancang berbasis inklusi tidak semata-mata berfungsi sebagai mata pelajaran normatif, melainkan juga sebagai sarana strategis dalam membentuk karakter sosial yang berkeadaban. Perkembangan sikap toleran yang tercipta di sekolah menjadi modal penting bagi peserta didik dalam beradaptasi di masyarakat luas yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan kondisi sosial yang beragam.

Selain berdampak pada peningkatan toleransi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif berperan penting dalam membangun kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas pembelajaran, seperti diskusi kelompok, simulasi, maupun proyek kolaboratif, memberikan kesempatan bagi mereka untuk melatih keterampilan komunikasi, berpikir kritis, serta kemampuan mengambil keputusan. Temuan dari studi literatur mengindikasikan bahwa siswa berkebutuhan khusus yang terlibat secara aktif lebih mampu mengembangkan rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial dan semakin mandiri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer nilai mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang aplikatif. Melalui pengalaman tersebut, anak berkebutuhan khusus memperoleh bekal keterampilan sosial yang esensial untuk mendukung integrasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Temuan penelitian menegaskan bahwa inisiatif pribadi anak berkebutuhan khusus merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian sosial mereka. Anak yang memperoleh dukungan melalui kurikulum yang fleksibel, strategi pembelajaran adaptif, serta lingkungan yang kondusif cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk mengambil inisiatif, baik dalam menjalin interaksi maupun dalam keterlibatan kegiatan sekolah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan kewarganegaraan inklusif mampu mengurangi ketergantungan terhadap orang lain sekaligus memperkuat kapasitas mereka sebagai individu yang mandiri. Rasa percaya diri yang semakin berkembang serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat menjadi modal utama bagi anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan inklusif tidak hanya memberikan pembelajaran normatif, tetapi juga membangun daya juang dan kemandirian anak dalam menghadapi tantangan. Hal ini semakin menegaskan posisi pendidikan kewarganegaraan inklusif sebagai strategi efektif dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, temuan studi literatur memperlihatkan bahwa penerapan pendidikan kewarganegaraan inklusif yang ditopang oleh kurikulum fleksibel, strategi pembelajaran adaptif, dukungan dari teman sebaya, serta keterlibatan aktif lingkungan sekolah mampu membawa dampak positif, baik pada aspek toleransi maupun kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus. Penerapan model ini tidak hanya memberikan manfaat signifikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan diri, tetapi juga memperkaya

pengalaman belajar siswa reguler melalui interaksi sosial yang lebih konstruktif. Pendidikan kewarganegaraan inklusif dengan demikian dapat diposisikan sebagai pendekatan strategis yang relevan dalam upaya membangun tatanan masyarakat yang lebih inklusif, toleran, serta berkeadaban. Hasil penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan yang menyatukan perbedaan. Temuan tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan dan praktik pendidikan yang adaptif serta responsif terhadap keragaman peserta didik di masa mendatang.

Pembahasan

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Inklusif dalam Meningkatkan Toleransi Anak Berkebutuhan Khusus: Sebuah Studi Literatur

Hasil temuan dari kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap toleransi antara siswa reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Melalui penerapan kurikulum yang fleksibel serta strategi pembelajaran adaptif, nilai-nilai fundamental seperti penghormatan terhadap keberagaman, prinsip kesetaraan, dan pemahaman tentang hak asasi manusia lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik. Toleransi tidak sekadar dipahami sebagai konsep teoretis, melainkan diwujudkan dalam praktik sehari-hari melalui interaksi langsung, baik melalui kegiatan kolaboratif, diskusi kelas, maupun simulasi social (Yu et al., 2021). Literatur terdahulu menegaskan bahwa ketika anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan partisipasi yang sama, siswa reguler menunjukkan sikap yang lebih terbuka, peduli, dan menghormati perbedaan. Dinamika ini pada akhirnya menggeser pandangan diskriminatif menuju kondisi yang lebih ramah inklusi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan inklusif dapat dipandang sebagai sarana strategis dalam membangun budaya toleransi yang kuat di lingkungan sekolah.

Dukungan yang diberikan oleh siswa sebaya terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat sikap toleransi di lingkungan pendidikan inklusif. Melalui penerapan program peer tutoring serta kerja kelompok yang dirancang secara inklusif, siswa dengan latar belakang kemampuan yang beragam dapat dipertemukan dalam aktivitas pembelajaran yang saling melengkapi (Syafira et al., 2024). Kondisi ini menciptakan ruang interaksi sosial yang lebih intensif, di mana siswa reguler memiliki kesempatan untuk memahami keterbatasan temannya, sementara anak berkebutuhan khusus memperoleh pengalaman positif dalam membangun kerjasama. Kajian literatur menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dalam interaksi tersebut lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian teori toleransi secara kognitif, karena siswa dilibatkan secara emosional maupun sosial. Dengan kata lain, pengalaman kebersamaan yang terbangun dalam proses pembelajaran menjadikan toleransi tidak hanya sebatas pemahaman akademis, tetapi juga tumbuh sebagai praktik nyata yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari siswa di sekolah.

Lingkungan sekolah yang kondusif memiliki peran penting dalam memperkuat terbentuknya sikap toleran pada peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam memperlakukan setiap siswa secara adil dan setara (Agustin et al., 2024). Orang tua turut serta memberikan dukungan moral yang konsisten serta memperkuat nilai-nilai toleransi di ranah keluarga, sehingga keberlanjutan pendidikan nilai dapat terjaga dalam berbagai konteks sosial. Kajian literatur menegaskan bahwa sekolah yang menumbuhkan budaya inklusif cenderung menghasilkan iklim saling menghargai, meminimalisasi diskriminasi, dan memperkuat solidaritas antar siswa. Dengan adanya kolaborasi yang harmonis antara guru, orang tua, dan siswa, maka tercipta ekosistem pendidikan yang mendukung internalisasi toleransi secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga dalam membangun kultur sosial yang lebih adil, inklusif, dan humanis di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Inklusif dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Anak Berkebutuhan Khusus: Sebuah Studi Literatur

Lingkungan sekolah yang kondusif memiliki peran penting dalam memperkuat terbentuknya sikap toleran pada peserta didik (Tarantino et al., 2022). Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam memperlakukan setiap siswa secara adil dan setara. Orang tua turut serta memberikan dukungan moral yang konsisten serta memperkuat nilai-nilai toleransi di ranah keluarga, sehingga keberlanjutan pendidikan nilai dapat terjaga dalam berbagai konteks sosial. Kajian literatur menegaskan bahwa sekolah yang menumbuhkan budaya inklusif cenderung menghasilkan iklim saling menghargai, meminimalisasi diskriminasi, dan memperkuat solidaritas antar siswa (Gusnarib A. Wahab & Rahmah, 2024). Dengan adanya kolaborasi yang harmonis antara guru, orang tua, dan siswa, maka tercipta ekosistem pendidikan yang mendukung internalisasi toleransi secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga dalam membangun kultur sosial yang lebih adil, inklusif, dan humanis di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.

Partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemampuan mereka dalam menjalin relasi sosial secara lebih efektif. Hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan kolaboratif, seperti diskusi kelas maupun

kerja tim, berfungsi sebagai media untuk menumbuhkan inisiatif sekaligus melatih keberanian dalam menyampaikan gagasan (Zara' & Jatningsih, 2021). Melalui interaksi tersebut, anak berkebutuhan khusus memperoleh pengalaman berharga yang memperkuat kemandirian dalam mengelola emosi, menyelesaikan perbedaan, serta mengatur peran dalam dinamika kelompok. Proses ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif bukan sekadar sarana penyampaian materi akademik, tetapi juga wadah pengembangan kecakapan sosial yang fundamental. Dengan berkembangnya kemandirian sosial, anak berkebutuhan khusus memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi tantangan, sekaligus mampu beradaptasi secara lebih fleksibel dengan lingkungan masyarakat di luar konteks sekolah.

Lingkungan inklusif yang mendapat dukungan penuh dari guru, teman sebaya, serta orang tua memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus (Jamwal et al., 2022). Guru bertugas memberikan kesempatan yang setara dalam setiap proses pembelajaran, sementara teman sebaya berfungsi sebagai jaringan dukungan sosial yang membantu proses adaptasi. Di sisi lain, orang tua berperan dalam menumbuhkan keberanian anak untuk mencoba berbagai pengalaman baru tanpa rasa ragu (Suroyyah & Harmanto, 2021). Temuan literatur menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang hidup dalam suasana inklusif lebih percaya diri untuk mengambil inisiatif, mampu berinteraksi secara aktif tanpa merasa takut, serta menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Fakta ini mengindikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan inklusif efektif dalam membentuk individu yang berdaya, mandiri, dan siap menghadapi tuntutan kehidupan sosial (Duffee et al., 2021). Oleh karena itu, implementasi model pendidikan ini dapat dipandang sebagai strategi berkelanjutan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, setara, dan menjunjung tinggi keberagaman.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat dipahami bahwa penerapan pendidikan kewarganegaraan inklusif memiliki potensi yang signifikan dalam menanamkan sekaligus memperkuat sikap toleransi pada anak berkebutuhan khusus. Prinsip inklusivitas dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek aksesibilitas fisik, melainkan juga mendorong tumbuhnya kesadaran sosial pada siswa reguler untuk menghargai perbedaan serta membangun relasi yang saling menghormati. Interaksi yang terbentuk di antara siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan inklusif turut menciptakan suasana sekolah yang lebih harmonis, toleran, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan prinsip inklusif dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, pengintegrasian pendekatan inklusif ke dalam kurikulum kewarganegaraan tidak hanya berdampak langsung pada anak berkebutuhan khusus, tetapi juga memperkaya pemahaman siswa lain tentang keberagaman sebagai bagian esensial dari kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa selain berperan dalam membangun toleransi, pendidikan kewarganegaraan inklusif juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus. Melalui penerapan kurikulum yang fleksibel, strategi pembelajaran yang adaptif, serta dukungan berkesinambungan dari guru, teman sebaya, dan orang tua, anak didorong untuk mengembangkan inisiatif, keberanian berinteraksi, dan kemampuan mengambil keputusan dalam berbagai situasi sosial. Lingkungan inklusif yang menekankan kesetaraan peran memungkinkan anak berkebutuhan khusus mengurangi ketergantungan pada orang lain sekaligus memperkuat rasa percaya diri. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan inklusif dapat dipandang sebagai sarana pemberdayaan yang melahirkan individu mandiri, adaptif, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Implikasi ini menunjukkan bahwa pendekatan inklusif relevan dijadikan strategi jangka panjang untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh dalam aspek sosial dan emosional.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, penerapan pendidikan kewarganegaraan inklusif menuntut adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sekolah, guru, orang tua, maupun masyarakat secara luas. Bentuk komitmen ini dapat diwujudkan melalui penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mampu menerapkan strategi pembelajaran adaptif, serta pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Proses evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan juga penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan sekaligus menemukan hambatan yang mungkin terjadi. Penelitian ini mendorong agar kajian selanjutnya memperluas analisis terhadap dampak jangka panjang pendidikan kewarganegaraan inklusif, termasuk menelaah variasi kontekstual lokal yang dapat memengaruhi praktik di berbagai wilayah. Dengan demikian, temuan penelitian di masa depan diharapkan dapat menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan inklusif yang berfokus pada peningkatan toleransi dan kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., Zakiah, L., Hasanah, A., Faruqi, M. I., & Maulidina, C. A. (2024). Implementasi Pendidikan Multikultural Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 875–882. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2217>
- Alva, E., Urcia, M., & Vivas, V. (2023). Civic Engagement of Future Citizens: An Insight from Peruvian Students' Attitudes towards Relevant Societal Issues as Predictors of Expected Conventional Political Participation. *Child Indicators Research*, 16(5), 2187–2221. <https://doi.org/10.1007/s12187-023-10049-7>
- Anderson, L. W. (2023). Civic education, citizenship, and democracy. *Education Policy Analysis Archives*, 31. <https://doi.org/10.14507/epaa.31.7991>
- Bozkus-Genc, G., & Sani-Bozkurt, S. (2022). How parents of children with autism spectrum disorder experience the COVID-19 pandemic: Perspectives and insights on the new normal. *Research in Developmental Disabilities*, 124, 104200. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104200>
- DiGiacomo, D. K., Hodgins, E., Kahne, J., & Trapp, S. (2021). Civic Education in a Politically Polarized Era. *Peabody Journal of Education*, 96(3), 261–274. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2021.1942705>
- Duffee, J., Szilagyi, M., Forkey, H., & Kelly, E. T. (2021). Trauma-Informed Care in Child Health Systems. *Pediatrics*, 148(2), e2021052579. <https://doi.org/10.1542/peds.2021-052579>
- Gusnarib A. Wahab, A. H., & Rahmah, H. (2024). Peran Pendidikan Inklusi dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Lembaga Pendidikan. *Equality Journal of Gender Child and Humanity*, 2(2), 61–75. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i2.3053>
- Guss, C. E., McAllister, A., & Gordon, C. M. (2021). DXA in Children and Adolescents. *Journal of Clinical Densitometry*, 24(1), 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.jocd.2020.01.006>
- Iyanda, A. E. (2022). Bullying Victimization of Children with Mental, Emotional, and Developmental or Behavioral (MEDB) Disorders in the United States. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 15(2), 221–233. <https://doi.org/10.1007/s40653-021-00368-8>
- Jamwal, R., Jarman, H. K., Roseingrave, E., Douglas, J., & Winkler, D. (2022). Smart home and communication technology for people with disability: A scoping review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 17(6), 624–644. <https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1818138>
- Lagler, F. B., Hirschfeld, S., & Kindblom, J. M. (2021). Challenges in clinical trials for children and young people. *Archives of Disease in Childhood*, 106(4), 321–325. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2019-318676>
- Lestari. (2022). Challenges in clinical trials for children and young people. *Archives of Disease in Childhood*, 106(4), 321–325. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2019-318676>
- Norwich, B., Moore, D., Stentiford, L., & Hall, D. (2022). A critical consideration of 'mental health and wellbeing' in education: Thinking about school aims in terms of wellbeing. *British Educational Research Journal*, 48(4), 803–820. <https://doi.org/10.1002/berj.3795>
- Peng, D. (2024). Civic education reform based on deep reinforcement learning model. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1), 20230417. <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00417>
- Rahman. (2021). Strategi Penanaman Sikap Toleransi Di Sekolah Inklusi SMPN 3 Krian Sebagai Perwujudan Education For All. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 367–381. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n2.p367-381>
- Sari. (2020). Implementasi pembelajaran PPKn pada kelas inklusi (Studi kasus di SMK Negeri 5 Mataram). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(1), 451–461. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i1.49744>

Wahyudi, S. (2025). Implementasi pendidikan kewarganegaraan inklusif dalam meningkatkan toleransi dan kemandirian sosial anak berkebutuhan khusus: Sebuah studi literatur. *International Journal of Educational Policy and Innovation (IJEPI)*, 1(1), 11–19.

Tarantino, G., Makopoulou, K., & Neville, R. D. (2022). Inclusion of children with special educational needs and disabilities in physical education: A systematic review and meta-analysis of teachers' attitudes. *Educational Research Review*, 36, 100456. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100456>

Weinschenk, A. C., & Dawes, C. T. (2022). Civic Education in High School and Voter Turnout in Adulthood. *British Journal of Political Science*, 52(2), 934–948. <https://doi.org/10.1017/S0007123420000435>

Woyshner, C. (2023). Civic education in informal settings: Black voluntary associations as schools for democracy, 1898-1959. *Theory & Research in Social Education*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/00933104.2023.2277438>

Yu, J. A., McKernan, G., Hagerman, T., Schenker, Y., & Houtrow, A. (2021). Identifying Children With Medical Complexity From the National Survey of Children's Health Combined 2016–17 Data Set. *Hospital Pediatrics*, 11(2), 192–197. <https://doi.org/10.1542/hpeds.2020-0180>

Zara', R. H., & Jatiningsih, O. (2021). PRAKTIK PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD MUHAMMADIYAH KOTA MADIUN. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 713–727. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p713-727>